



PUTUSAN
Nomor 811/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Pertamina (Persero), beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur 1A, Gambir, Jakarta Pusat, 10110, dalam hal ini diwakili oleh Arief Budiman, jabatan Direktur Perseroan;
Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Yudi Wahyudi;
2. Maizar Yanto;
3. Afan Aftory;

Masing-masing sebagai pekerja PT Pertamina (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-022/H00000/2015-S0, tanggal 09 Oktober 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

Direktur Jenderal Pajak, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63410/PP/M.IIA/16/2015, tanggal 08 September 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 033/H00000/2014-S4 tanggal 28 Januari 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Latar Belakang

bahwa Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00476/207/10/051/12 tanggal 10 Desember 2012 Masa Pajak Agustus 2010 senilai Rp50.479.427.147,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding telah mengajukan Surat Keberatan Nomor 158/H00000/2013-S4 tanggal 1 Maret 2013 atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00476/207/10/051/12 tanggal 10 Desember 2012 Masa Pajak Agustus 2010 senilai Rp50.479.427.147,00;

bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1533/WPJ.19/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00476/207/10/051/12 tanggal 10 Desember 2012 Masa Pajak Agustus 2010 yang menolak Keberatan Wajib Pajak dalam Suratnya Nomor 158/H00000/2013-S4 tanggal 1 Maret 2013 dan mempertahankan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00476/207/10/051/12 tanggal 10 Desember 2012 Masa Pajak Agustus 2010 senilai Rp50.479.427.147,00;

II. Dasar Hukum

bahwa pengajuan banding Pemohon Banding mengacu pada ketentuan:

Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi:

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut;

Pasal 35 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berbunyi:

Pasal 35

- (1) Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- (2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Uraian Permohonan Banding

bahwa menunjuk Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor 158/H00000/2013-S4 tanggal 1 Maret 2013 atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00476/207/10/051/12 tanggal 10 Desember 2012 Masa Pajak Agustus 2010 senilai Rp50.479.427.147,00, diketahui koreksi menurut Terbanding yang menjadi dasar sengketa adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Perbandingan SPT PPN Masa Agustus 2010 dan SKPKB PPN Masa Agustus 2010

| No | URAIAN | Jumlah Rupiah Menurut | | Selisih (Rp) |
|----|---|-----------------------|--------------------|------------------|
| | | Pengusaha Kena Pajak | Fiskus | |
| 1 | Dasar Pengenaan Pajak: | | | |
| a | Atas Penyerahan Barang dan Jasa Yang terutang PPN | | | |
| | a.1 Ekspor | 1.669.320.381.385 | 1.669.320.381.385 | - |
| | a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | 25.552.914.181.425 | 25.577.421.526.793 | (24.507.345.368) |
| | a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN | 5.309.017.789.400 | 5.309.017.789.400 | - |
| | a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut | 508.823.732.153 | 508.823.732.153 | - |
| | a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN | 5.520.346.100 | 5.520.346.100 | - |
| | a.6 Jumlah (a1 + a2 + a3 + a4 + a5) | 33.045.596.430.463 | 33.070.103.775.831 | (24.507.345.368) |
| b | Atas Penyerahan Barang dan Jasa Yang tidak terutang PPN | - | - | - |
| c | Jumlah Seluruh Penyerahan | 33.045.596.430.463 | 33.070.103.775.831 | (24.507.345.368) |
| 2 | Penghitungan PPN Kurang Bayar | | | |
| A | Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7) | 2.555.291.418.142 | 2.557.742.152.679 | (2.450.734.537) |
| B | Dikurangi | | | |
| | b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama | 1.012.008.469.298 | 1.012.008.469.298 | - |
| | b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | 1.562.501.569.669 | 1.539.712.590.633 | 22.788.979.036 |
| | b.5 Lain-lain | 73.407.610.621 | 73.407.610.621 | - |
| | b.6 Jumlah (b.2 + b5) | 2.647.917.649.588 | 2.625.128.670.552 | 22.788.979.036 |
| D | Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan | 2.647.917.649.588 | 2.625.128.670.552 | 22.788.979.036 |
| E | Jumlah Perhitungan PPN Kurang bayar (a-d) | (92.626.231.446) | (67.386.517.873) | (25.239.713.573) |
| 3 | Kelebihan Pajak | | | |
| a. | Dikompensasikan ke Masa pajak berikutnya | 92.626.231.446 | 92.626.231.446 | - |
| b. | Dikompensasikan ke masa Pajak... (karena pembetulan) | 0 | 0 | - |
| c. | Jumlah (a + b) | 92.626.231.446 | 92.626.231.446 | - |
| 4 | PPN yang Kurang Dibayar | - | 25.239.713.573 | (25.239.713.573) |
| 5 | Sanksi Administrasi | - | 25.239.713.573 | (25.239.713.573) |
| 6 | Jumlah PPN yang masih harus dibayar | | 50.479.427.146 | (50.479.427.146) |

bahwa SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Nomor 000476/207/10/051/12 Masa Pajak Agustus 2010 tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp50.479.427.146,00 (Lima Puluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah) yang berasal dari koreksi Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang dilakukan oleh Pemeriksa dengan perincian sebagai berikut:

| | Pajak Keluaran | Pajak Masukan | Total Selisih |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Menurut Pemeriksa | Rp2.557.742.152.679 | Rp1.539.712.590.633 | |
| Menurut Wajib Pajak | Rp2.555.291.418.142 | Rp1.562.501.569.669 | |
| Koreksi | Rp2.450.734.537 | Rp(22.788.979.036) | Rp25.239.713.573 |
| Sanksi Administrasi | | | Rp25.239.713.573 |
| Total SKPKB | | | Rp50.479.427.146 |



bahwa koreksi kredit pajak PPN Dalam Negeri yang dikoreksi sebesar Rp22.788.979.036,00 terdiri atas:

Tabel 2. Uraian Koreksi Pajak Masukan

| No | Uraian | Jumlah Rupiah |
|----|--|-----------------------|
| 1 | Koreksi atas Pengkreditan Pajak Masukan Dobel | 3.692.727.097 |
| 2 | Koreksi atas Pengkreditan Pajak Masukan jasa pengolahan LNG | 18.607.407.223 |
| 3 | Koreksi atas Pajak Masukan dengan NPWP salah | 331.934.215 |
| 4 | Koreksi atas Pajak Masukan hasil konfirmasi negative KPP lawan transaksi | 24.236.145 |
| 5 | Koreksi atas Pajak Masukan melebihi 3 bulan | 132.674.356 |
| 6 | Koreksi hasil penghitungan kembali Pajak Masukan | - |
| | Total | 22.788.979.036 |

bahwa menunjuk Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1533/WPJ.19/2013 tanggal 30 Oktober 2013 memuat selisih data dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3. Perbandingan PPN Kurang Bayar

| Uraian | Semula | Ditambah/(Dikurangi) | Menjadi |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| PPN Kurang Bayar | 25.239.713.573 | - | 25.239.713.573 |
| Sanksi Bunga | - | - | - |
| Sanksi Kenaikan | 25.239.713.573 | - | 25.239.713.573 |
| Jumlah PPN ymh dibayar | 50.479.427.146 | - | 50.479.427.146 |

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bersama ini Pemohon Banding sampaikan Permohonan Banding atas Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-1533/WPJ.19/2013 tanggal 30 Oktober 2013 sebagai berikut:

A. Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp18.607.407.223,00

Menurut Terbanding

1. Koreksi Saat Pemeriksaan

bahwa Daftar Hasil Temuan PPN SPHP Tahun 2010: Berdasarkan data/informasi yang diberikan seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP WP Besar Tiga, Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PT Badak NGL dan PT Arun NGL harus dikoreksi disebabkan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha PT Pertamina (Persero). Selain daripada itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha masih dimungkinkan pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PPN. Koreksi tersebut didasarkan pada ketentuan pada Pasal 9 ayat 8 huruf b UU PPN beserta Penjelasannya, Kep-754/PJ./2001, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Risalah Pembahasan butir 14.c. nomor 4: Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir disebutkan bahwa Pemeriksa Pajak tidak setuju atas tanggapan WP dan mempertahankan koreksi faktur pajak masukan yang diterbitkan Badak NGL & Arun LNG sebesar total Rp202.944.981.360,00 dimana hal ini disebabkan karena Surat Dirjen Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 tanggal 30 Oktober 1992 kedudukannya hanyalah sebagai penegasan saja dan bukan sebagai "*Lex Specialist*" dalam Ilmu Hukum seperti yang dimaksud Wajib Pajak dalam surat tanggapannya. Menurut Pemeriksa kedudukan *Lex Specialist* dalam Ilmu Hukum kedudukannya harus sama seperti Undang-Undang Pajak. Selain itu dalam Surat Dirjen Pajak tersebut dalam poin 3 disebutkan bahwa syarat bisa mengkreditkan PPN Masukan adalah selama barang tersebut milik Pertamina sehingga Pertamina juga bisa melakukan ekspor dan membuat Faktur Pajak Ekspor (PEB). Dalam tahun pajak 2010, PT Pertamina (Persero) tidak membuat Faktur Pajak Ekspor atas LNG dari Badak NGL dan Arun NGL;

2. Tahapan Keberatan

bahwa mengacu kepada Pendapat Penelaah Keberatan sebagaimana dituangkan dalam SPUH sebagai berikut:

- a. bahwa alasan PPN Masukan jasa pengolahan LNG diperlakukan secara khusus tidak dapat dipertimbangkan karena Surat Dirjen Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 tidak dapat disetarakan dengan Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 dan UU PPN;
- b. bahwa Pajak Masukan jasa pengolahan LNG tidak memenuhi syarat material (Pasal 1 Angka 24 UU PPN) karena PT Pertamina (Persero) bukan pemilik LNG, sehingga Pajak Masukan terkait penjualan LNG bukan merupakan hak PT Pertamina (Persero);
- c. bahwa Faktur Pajak Masukan jasa pengolahan LNG yang diterbitkan oleh PT Badak NGL Co. dan PT Arun NGL Co. tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha PT Pertamina (Persero) sebagai pihak yang ditunjuk untuk menjualkan LNG milik pemerintah (BP Migas);

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan

Halaman 5 dari 52 halaman. Putusan Nomor 811/B/PK/PJK/2016

Nomor 811/B/PK/PJK/2016 – Rancangan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Perinta Naikah Putusan – Tafsir Penafsiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

A. Latar Belakang Skema LNG Project

1. Skema LNG Project.

bahwa Pihak-Pihak yang menjalankan LNG Project merupakan satu kesatuan proses bisnis yang terdiri dari Pemerintah Indonesia, Pertamina, PSC (saat ini disebut KKKS), PT Arun NGL.Co dan PT Badak NGL Co. Dasar-Dasar pelaksanaan LNG Project ini merujuk kepada *Principle of Agreement (PoA)* dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;

2. Penugasan Pemerintah kepada Pertamina.

bahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak tahun 1974 (sebelum Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001) sampai dengan sekarang dimana peran Pertamina tidak berubah yakni sebagai pihak yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah yang ditegaskan melalui:

- a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts-2751/BP00000/2002-SO tentang Kontrak-Kontrak Berjalan (*Existing Contracts*) tanggal 4 Desember 2002, menetapkan: menunjuk Pertamina sebagai Penjual Gas Bumi bagian Negara, selanjutnya melakukan pembicaraan lanjut dengan pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian jual beli gas bumi masing-masing mengenai perubahan-perubahan yang diperlukan untuk menjaga kontinuitas operasi dan kelangsungan perjanjian jual beli gas bumi; Surat BP MIGAS ini menunjukkan peran Pertamina dalam skema LNG Project tidak berubah pada periode sebelum maupun sesudah pemberlakuan Undang-Undang Migas Nomor 22 tahun 2001 atau peran Pertamina tidak berubah baik sebelum maupun setelah berstatus sebagai PT Pertamina (Persero);
- b) Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1869 K/10/MEM/2007 tentang Pelaksanaan Kegiatan Bisnis *Liquefied Natural Gas (LNG)* Arun dan *Liquefied Natural Gas (LNG)* Badak tanggal 19 Juni 2007 menetapkan: BP MIGAS menguasai kepada PT Pertamina (Persero) untuk tetap bertindak sebagai pihak



dalam perjanjian dan/atau kesepakatan antara *Trustee and Paying Agent Agreement, Loan Agreement, Supply Agreement, Agreement for Use, and Operation of Plant, Processing Agreement, Principles of Agreement*, dan *Producers Agreement*;

bahwa berdasarkan kedua surat penugasan Pemerintah kepada Pertamina menunjukkan bahwa Pertamina harus menjalankan penugasan Pemerintah yang berperan sebagai penjual LNG bagian Negara dan tetap bertindak sebagai pihak dalam perjanjian/kesepakatan tertulis dalam LNG Project.

3. Pencatatan Biaya Pengolahan LNG dan Penghasilan LNG Project.

bahwa dalam penugasan Pemerintah kepada Pertamina sebagai penjual LNG dan kewajiban lain yang melekat, biaya Pengolahan LNG dan penghasilan penjualan/Ekspor LNG merupakan bagian dari *Production Sharing Percentage LNG Project* sesuai dengan Badak *LNG Processing Agreement Art.13* dan Arun *LNG Processing Agreement Art.12* sehingga biaya Pengolahan LNG dan penghasilan penjualan/Ekspor LNG tidak dibukukan di Pertamina yang telah berlangsung sejak dimulainya LNG Project (baik sebelum dan sesudah Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001). Pencatatan biaya pengolahan/harga perolehan terkait Jasa Pengolahan LNG dan penyerahan Barang Kena Pajak (ekspor LNG) tidak dilakukan oleh Pertamina sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kondisi ini tidak sejalan dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPN Nomor 8 tahun 1983 yang berbunyi:

"Setiap Pengusaha Kena Pajak diwajibkan mencatat semua jumlah harga perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dalam pembukuan perusahaan";

bahwa Pelaksanaan Pengolahan LNG dilakukan oleh PT Badak NGL dan PT Arun NGL yang pembentukannya bukan untuk tujuan Laba/Komersial sebagaimana lazimnya pembentukan Perseroan Terbatas bersifat komersial sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pembentukan PT Badak NGL dan PT Arun NGL lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrik Pengolahan gas (*Liquefaction Plant*) sebagaimana diatur dalam *Principle of*



Agreement (PoA) tanggal 20 April 1973. Secara Pembiayaan Pengolahan LNG dilakukan dengan mekanisme *cash call* dan dana ini habis digunakan untuk operasi (*Non Profit*);

B. Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Pengolahan LNG

bahwa sesuai penjabaran pada A.2 dan A.3, Pertamina menilai bisnis ini tidak mengikuti ketentuan normal atau tidak lazim dalam ketentuan perpajakan, maka diimplementasikan perlakuan khusus terhadap pemenuhan kewajiban PPN atas Jasa Pengolahan LNG dengan bukti korespondensi sebagai berikut:

1. Surat Menteri Muda Keuangan Nomor S-721/PJ.3/1989 tanggal 29 Mei 1989, perihal PPN atas LNG/LPG. Pada Pokok Surat ini menyebutkan bahwa LNG/LPG ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak dan atas ekspor LNG/LPG terutang PPN dengan tarif 0%, Pajak Masukan yang dibayar untuk menghasilkan LNG/LPG sejak 1 Juni 1989 dapat dikreditkan atau diminta kembali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1988;
2. Surat Dirjen Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 tanggal 30 Oktober 1992 tentang PPN atas PT Arun NGL.Co dan PT Badak NGL.Co. Pada Pokok Surat ini menyebutkan bahwa Jasa Pengolahan LNG merupakan Jasa Kena Pajak dan Pertamina berhak mengkreditkan PPN Masukan Jasa Pengolahan LNG.

bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerbitan Surat Dirjen Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 tanggal 30 Oktober 1992 tentang PPN atas PT Arun NGL.Co dan PT Badak NGL.Co., Dirjen Pajak tidak bermaksud untuk menyetarakan dengan Undang-Undang namun semata-mata untuk mengatur/memperlakukan secara khusus pengkreditan dan permintaan kembali PPN Jasa Pengolahan LNG pada LNG Project;

bahwa karena kekhususan perlakuan PPN Jasa Pengolahan LNG tersebut, Pertamina menerbitkan pedoman Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pajak Pertambahan Nilai LNG/LPG PT Arun NGL dan PT Badak NGL, sesuai surat Keputusan Direksi Nomor KPTS-054/C0000/93-B1 tanggal 5 Maret 1993;

bahwa Pengkreditan PPN Jasa Pengolahan LNG oleh Pertamina substansinya adalah melakukan reimburse (mengganti kembali)



dana Pertamina yang sudah dibayarkan kepada PT Badak NGL dan PT Arun NGL untuk menalangi PPN Jasa Pengolahan LNG yang harus disetor oleh PT Badak NGL dan PT Arun LNG kepada Kas Negara sebagai konsekuensi status PKP yang dimiliki oleh PT Badak NGL dan PT Arun NGL;

bahwa perlakuan khusus terhadap LNG Project tidak dapat dilihat hanya dari sudut pandang hierarki hukum pajak namun harus dilakukan analisis secara menyeluruh terhadap peran masing-masing pihak yang menyelenggarakan LNG Project;

C. Penerapan Asas-asas Hukum Pajak pada PPN Jasa Pengolahan LNG

bahwa reformasi perpajakan yang dilakukan sejak tahun 1984 untuk memenuhi asas-asas hukum di bidang perpajakan untuk menjamin diantaranya keadilan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak sebagaimana uraian di bawah ini:

1. Asas Keadilan

bahwa Asas Keadilan dibidang Perpajakan merupakan tujuan hukum perpajakan yang mengandung arti tidak memihak (*impartiality*) yang mendukung persamaan (*equality*) hak dan kewajiban para Wajib Pajak. Dengan kata lain, sanksi perpajakan dapat dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan dengan sengaja/iktikad buruk atas ketentuan yang memiliki kepastian hukum;

bahwa Pemohon Banding telah menjalankan amanah penugasan pemerintah sebagai penjual LNG bagian Negara dengan memenuhi kewajiban PPN Jasa Pengolahan LNG dan mengikuti aturan penugasan pemerintah dalam rangka membantu Negara untuk menjalankan penugasan LNG Project. Dukungan Pertamina memberikan manfaat kepada Negara (Proses Pengelolaan LNG Project berjalan dengan baik) dan tidak merugikan Negara. Sebagai bentuk pemenuhan kewajiban PPN diantaranya Pembayaran PPN atas Jasa Pengolahan LNG kepada Badak-Arun dan dilunasinya PPN terhutang oleh Badak-Arun. Atas pembayaran PPN tersebut Pertamina melakukan pengkreditan PPN atas Jasa Pengolahan LNG berdasarkan penegasan instansi pemerintah yang berwenang;

bahwa setelah Pemohon Banding dengan iktikad baik



menjalankan amanah penugasan pemerintah dengan dasar penegasan Dirjen Pajak tahun 1992 atas pengkreditan PPN Jasa Pengolahan LNG justru berakibat Pertamina dikenakan sanksi perpajakan. Dalam hal ini Dirjen Pajak pada saat ini hanya melihat hukum formal dan mengesampingkan asas keadilan dengan menghukum Pemohon Banding sebagai pihak yang telah mematuhi pemerintah. Sanksi perpajakan yang dibebankan kepada Pemohon Banding juga menyinggung asas hukum pajak yang lain, yakni asas kepastian hukum (*Legal Certainty*);

2. Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

bahwa Asas Kepastian Hukum di bidang perpajakan meletakkan hukum sebagai pedoman yang bersifat pasti sehingga pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan dilakukan tanpa adanya keraguan dan tidak terdapat tumpang tindih pelaksanaan kebijakan perpajakan bagi Wajib Pajak;

bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, LNG Project memiliki skema bisnis yang tidak normal atau tidak lazim dalam ketentuan perpajakan, Pemohon Banding dalam menjalankan kewajiban penugasan pemerintah mengalami kondisi tidak terpenuhinya asas kepastian hukum. Dalam rangka memenuhi asas kepastian hukum, maka Pemerintah c.q Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak melalui S-721/PJ.3/1989 dan S-1936/PJ.51/1992 telah memberikan penegasan bahwa PPN Jasa Pengolahan LNG dapat dikreditkan atau diminta kembali oleh Pemohon Banding;

bahwa pada tahapan pemeriksaan dan keberatan untuk tahun pajak 2010 Terbanding telah melakukan koreksi pengkreditan PPN Jasa Pengolahan LNG yang berlawanan/kontra dengan asas kepastian hukum;

IV. Kesimpulan

bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum, Pemohon Banding mohon Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mulia mengabulkan permohonan banding ini dan memutuskan bahwa Pertamina berhak mengkreditkan PPN Jasa Pengolahan LNG sebesar Rp18.607.407.223,00 sehingga jumlah PPN yang masih harus dibayar semula Rp50.479.427.146,00 menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.264.612.700,00 sesuai dengan Tabel Permohonan Banding sebagai berikut:

Tabel 4. Permohonan Banding

| No | URAIAN | Jumlah Rupiah Menurut | | Nilai Sengketa |
|----|---|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Kep. Dirjen 1533/WPJ.19/2013 | Permohonan Banding | |
| 1 | Dasar Pengenaan Pajak: | | | |
| a | Atas Penyerahan Barang dan Jasa Yang terutang PPN | | | |
| | a.1 Ekspor | 1.669.320.381.385 | 1.669.320.381.385 | - |
| | a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | 25.577.421.526.793 | 25.577.421.526.793 | - |
| | a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN | 5.309.017.789.400 | 5.309.017.789.400 | - |
| | a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut | 508.823.732.153 | 508.823.732.153 | - |
| | a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN | 5.520.346.100 | 5.520.346.100 | - |
| | a.6 Jumlah (a1 + a2 + a3 + a4 + a5) | 33.070.103.775.831 | 33.070.103.775.831 | - |
| b | Atas Penyerahan Barang dan Jasa Yang tidak terutang PPN | - | - | - |
| c | Jumlah Seluruh Penyerahan | 33.070.103.775.831 | 33.070.103.775.831 | - |
| 2 | Penghitungan PPN Kurang Bayar | | | |
| A | Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7) | 2.557.742.152.679 | 2.557.742.152.679 | - |
| B | Dikurangi | | | |
| | b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama | 1.012.008.469.298 | 1.012.008.469.298 | - |
| | b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | 1.539.712.590.633 | 1.558.319.997.856 | (18.607.407.223) |
| | b.5 Lain-lain | 73.407.610.621 | 73.407.610.621 | - |
| | b.6 Jumlah (b.2 + b5) | 2.625.128.670.552 | 2.643.736.077.775 | (18.607.407.223) |
| D | Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan | 2.625.128.670.552 | 2.643.736.077.775 | (18.607.407.223) |
| E | Jumlah Perhitungan PPN Kurang bayar (a-d) | (67.386.517.873) | (85.993.925.096) | 18.607.407.223 |
| 3 | Kelebihan Pajak | | | |
| d. | Dikompensasikan ke Masa pajak berikutnya | 92.626.231.446 | 92.626.231.446 | - |
| e. | Dikompensasikan ke masa Pajak... (karena pembetulan) | - | - | - |
| f. | Jumlah (a + b) | 92.626.231.446 | 92.626.231.446 | - |
| 4 | PPN yang Kurang Dibayar | 25.239.713.573 | 6.632.306.350 | 18.607.407.223 |
| 5 | Sanksi Administrasi | 25.239.713.573 | 6.632.306.350 | 18.607.407.223 |
| 6 | Jumlah PPN yang masih harus dibayar | 50.479.427.146 | 13.264.612.700 | 37.214.814.446 |

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63410/PP/M.IIA/16/2015, tanggal 08 September 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1533/WPJ.19/2013 tanggal 30 Oktober 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 Nomor 00476/207/10/051/12 tanggal 10 Desember 2012, atas nama: PT. Pertamina (Persero), NPWP: 01.001.664.0.051-000, beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur 1A, Gambir, Jakarta Pusat 10110;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63410/PP/M.IIA/16/2015, tanggal 08 September 2015, diberitahukan kepada Pemohon Banding pada tanggal 29 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SK-022/H00000/2015-S0, tanggal 09 Oktober 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 09 November 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 09 November 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 26 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG POKOK SENGKETA PENGAJUAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Memori Peninjauan Kembali ini adalah:

Tentang koreksi kredit Pajak Masukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masa Agustus 2010 sebesar Rp18.607.407.223,00;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pengkreditan Pajak Masukan PPN Dalam Negeri berupa PPN Jasa pengelolaan LNG berdasarkan skema penugasan proyek LNG dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1869 K/10/MEM/2007) dan Surat Penegasan Direktorat Jenderal Pajak (Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 tanggal 30 Oktober 1992 perihal PPN atas PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co.)

II. TENTANG PEMBAHASAN POKOK SENGKETA PENINJAUAN KEMBALI

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan



Pajak Nomor Put.63410/PP/M.IIA/16/2015 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*), pengabaian historis/penetapan pemerintah terdahulu dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan perpajakan/lainnya dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan perpajakan/lainnya yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Tentang koreksi pengkreditan Pajak Masukan LNG masa Agustus 2010 sebesar Rp18.607.407.223,00 yang tetap dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63410/PP/M.IIA/16/2015 tanggal 08 September 2015 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas koreksi Pengkreditan Pajak Masukan sebesar Rp18.607.407.223,00 dalam Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena:

- a) Nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyimpulkan bahwa Pajak Masukan sebesar Rp18.607.407.223,00 yang dikreditkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN karena pembayaran PPN bukan atas perolehan BKP/JKP melainkan Pemohon Banding membayar PPN bersifat menalangi pembayaran PPN bukan atas perolehan BKP/JKP, telah keliru;
- b) Majelis Hakim dalam rangka mengadili dan memutus sengketa perkara banding telah mengabaikan fakta hukum dan bukti serta peraturan lainnya yang terkait;



- c) Majelis Hakim dalam rangka mengadili dan memutus sengketa perkara banding telah mengabaikan asas keadilan dan kepastian hukum yang dijunjung dalam Undang-Undang Perpajakan;
- d) Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan memutuskan secara tidak adil dan telah sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baik secara yuridis maupun finansial tanpa mempertimbangkan kebijakan skema LNG oleh pemerintah dan keberlangsungan proyek LNG (tidak terjadi kerugian negara) serta negara telah menerima keuntungan dari proyek LNG selama 36 tahun (sampai dengan Tahun 2010) terus menerus sejak tahun 1974;

Penjelasan Memori Peninjauan Kembali atas koreksi pengkreditan Pajak Masukan masa Agustus 2010 sebesar Rp18.607.407.223,00 dalam Putusan Pengadilan Pajak, diuraikan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Pajak nyata-nyata telah keliru menggunakan amar pertimbangan hukum atas koreksi pengkreditan Pajak Masukan atas jasa pengolahan LNG sebesar Rp18.607.407.223,00 bukan merupakan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam UU PPN karena pembayaran PPN bukan atas perolehan BKP/JKP melainkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membayar PPN bersifat menalangi pembayaran PPN bukan atas perolehan BKP/JKP. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah keliru memahami substansi kekhasan bisnis LNG dengan mengabaikan penetapan pemerintah atas skema LNG, penugasan pengelolaan LNG kepada Pertamina, keberlangsungan bisnis LNG milik pemerintah, serta perlakuan khas atas PPN jasa pengolahan LNG yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak sendiri (Termohon Peninjauan Kembali (semula terbanding)). Penetapan Dirjen Pajak/Otoritas yang berwenang berupa Surat Penegasan yang dipatuhi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sehingga dengan sengaja menciptakan ketidakadilan dalam penerapan hukum pajak.
2. Amar pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta hukum dan peraturan lainnya yang berlaku meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
 - d. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1869 K/10/MEM/2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang Pelaksanaan Kegiatan Bisnis *Liquefied Natural Gas (LNG)* Arun dan *Liquefied Natural Gas (LNG)* Badak.
 - e. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-65/PJ.51/1993 tanggal 18 Januari 1993, perihal Petunjuk Tatacara Pelaksanaan PPN LNG/LPG.
 - f. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 tanggal 30 Oktober 1992 perihal PPN atas PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co.
 - g. Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Nomor Kpts-2751/BP00000/2002-S0 tanggal 04 Desember 2002 tentang Kontrak-Kontrak Berjalan (*Existing Contracts*).
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan asas keadilan dan kepastian hukum dalam pengambilan keputusan. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melaksanakan keseluruhan penugasan dalam skema bisnis LNG berdasarkan pada ketentuan yang bersifat "khas" demi kelangsungan penerimaan Negara bersama-sama dengan Pemerintah dan KKKS. Namun di akhir-akhir peran Pertamina setelah 36 tahun, setelah melalui proses keberatan dan banding, keliru dipahami secara substansi oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan hukum yang telah diterapkan selama kurun waktu yang sangat Panjang. Pembayaran PPN yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pengejawantahan Pasal 33 UUD 1945 demi menjaga kelangsungan proyek LNG dan operasi Pabrik pengolahan LNG. Akibat keputusan Hakim Majelis Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus menanggung beban yang tidak adil, yakni 3(tiga) kali besaran PPN. Sementara beban Pemerintah dan KKKS hanya berupa *Marketing Fee* yang bersifat mengganti biaya operasional Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga telah mengabaikan asas Kepastian Hukum yang mana Skema Bisnis LNG telah disetujui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Surat

Halaman 15 dari 52 halaman. Putusan Nomor 811/B/PK/PJK/2016

Nomor 811/B/PK/PJK/2016 – Rancangan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Perintah Naik Putusan – Tafsir Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirjen Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 dan surat tersebut tidak pernah dicabut sampai dengan sekarang. Dasar inilah sampai sekarang menjadi acuan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, SKK Migas dan KKKS yang dianggap salah oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) (ketentuan ini pun diterbitkan dan disalahkan sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Secara prinsip hukum haruslah mengikat, istilah hukum yang sangat dikenal yakni *Pacta Sunt Servanda* (*agreements must be kept*), keberlangsungan selama 36 tahun merupakan hukum yang mengikat menjunjung asas kepastian hukum.

PENEGASAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI ATAS PENGKREDITAN PPN JASA PENGOLAHAN LNG MASA AGUSTUS 2010.

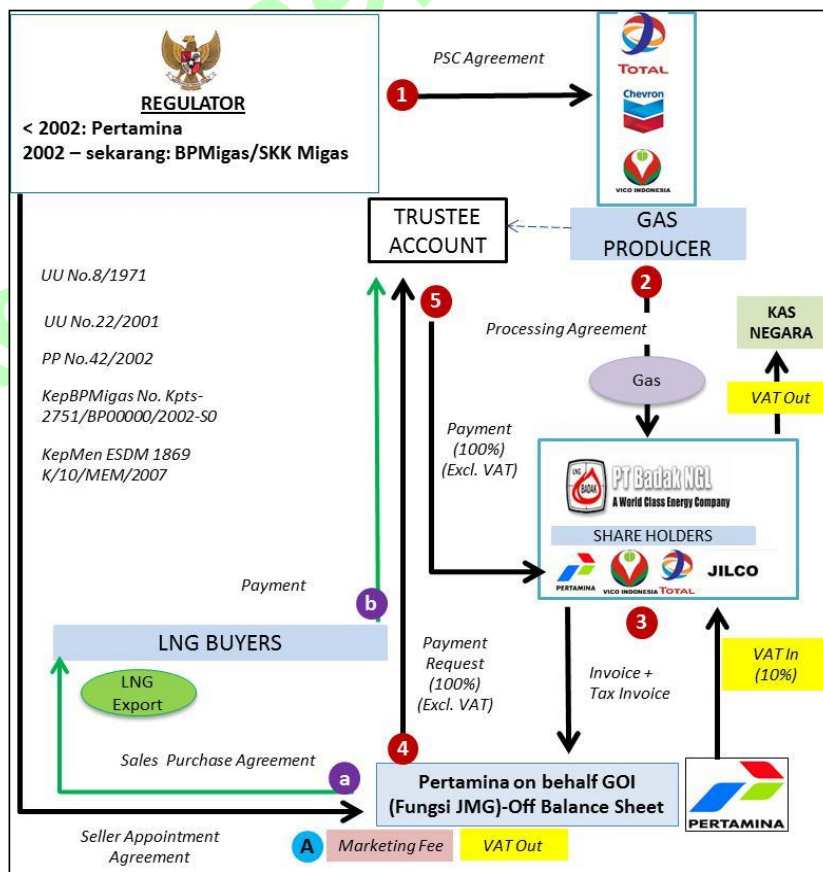
1. Fakta-Fakta Dalam Pembahasan Persidangan

Fakta selama proses persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan surat/dokumentasi terkait perlakuan pengkreditan PPN atas jasa pengolahan LNG oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):

- a. Proses bisnis pengolahan LNG merupakan satu kesatuan bisnis hulu minyak dan gas bumi antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), pemerintah (diwakili BP Migas), PT Badak NGL Co., PT Arun NGL Co., dan KKKS. Peran dari masing-masing pihak adalah:
 - i) Pemerintah adalah representasi negara sebagai pemilik Gas Bumi mulai dari cadangan sampai menjadi LNG di titik penjualan;
 - ii) Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan perwakilan Pemerintah/Negara dalam melaksanakan penugasan menjual LNG secara keseluruhan (*single seller*);
 - iii) KKKS mengembangkan lapangan dan memproduksi gas. Masing-masing KKKS mendapat LNG bagiannya di titik penjualan sesuai porsi sebagaimana tersebut dalam kontrak PSC;
 - iv) PT Badak NGL Co. dan PT Arun NGL Co. memproses gas bumi menjadi LNG;



- b. Proses bisnis pengelolaan LNG secara garis besar dimulai dari diproduksi gas alam oleh Produser yaitu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan KKKS dari lapangan gas alam, kemudian gas alam tersebut didinginkan sehingga berbentuk cair dan disebut dengan LNG (*Liquified Natural Gas*). Proses pendinginan dilakukan oleh PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. selaku *Operator*. Produksi LNG kemudian dikapalkan kepada pembeli di luar negeri melalui Pertamina sebagai *single seller*. Hasil penjualan LNG ditransfer ke *Trustee Account*, dimana hasil penjualan tersebut akan dikurangi dengan biaya operasi dan biaya pengapalan, kemudian hasilnya dibagi antara Pemerintah dan KKKS. Biaya pengolahan LNG dibayarkan kepada Operator yang diambil dari *Trustee Account*. Sedangkan PPN biaya pengolahan LNG dibayarkan/ditalangi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kemudian melakukan pengkreditan atas PPN jasa pengolahan LNG dalam SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun skema bisnis LNG digambarkan sebagai berikut:



Gambar I. Skema Khas Bisnis LNG

Keterangan:

1. *Production Sharing Contract (PSC) Agreement* antara Pemerintah dengan *PSC Company* dalam pelaksanaan eksploitasi gas.
2. Gas Alam hasil produksi PSC diolah menjadi LNG .
3. PT Badak NGL Co. mengirimkan *Invoice* dan faktur pajak kepada Pertamina (fungsi *Joint Management Group*) atas nama pemerintah. Selanjutnya Pertamina membayar PPN atas jasa pengelolaan LNG kepada PT Badak NGL Co..
4. Permintaan pembayaran jasa pengelolaan LNG (tidak termasuk PPN) kepada pemilik proyek melalui *Trustee Account*.
5. Pembayaran jasa pengelolaan LNG kepada PT Badak NGL Co..
 - a. *Sales Purchase Agreement* antara Pertamina dengan *Buyer*;
 - b. Pembayaran hasil penjualan LNG dikirim ke *Trustee Account* oleh *Buyer*;



- A. Atas penugasan ini Pertamina mendapatkan *marketing fee*;
- c. Dokumen formil aktivitas pengelolaan LNG yang diterbitkan otoritas keuangan dan pajak meliputi:
- i) Surat Menteri Muda Keuangan Nomor S-721/PJ.3/1989 tanggal 29 Mei 1989, perihal PPN atas LNG/LPG. Pada Pokok Surat ini menyebutkan bahwa LNG/LPG ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak dan atas ekspor LNG/LPG terutang PPN dengan tarif 0%, Pajak Masukan yang dibayar untuk menghasilkan LNG/LPG sejak 01 Juni 1989 dapat dikreditkan atau diminta kembali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1988;
 - ii) Surat Dirjen Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 tanggal 30 Oktober 1992 tentang PPN atas PT Arun NGL.Co dan PT Badak NGL.Co. Pada Pokok Surat ini menyebutkan bahwa Jasa Pengolahan LNG merupakan Jasa Kena Pajak dan Pertamina berhak mengkreditkan PPN Masukan Jasa Pengolahan LNG.
- d. Pembebanan/Pembayaran PPN pengelolaan LNG. PT Badak NGL Co. menerbitkan Faktur Pajak jasa pengolahan LNG yang ditujukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Adapun alasan Pertimbangan Hukum Pembebanan PPN Pengolahan LNG kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):
- i) Pemerintah: Bukan entitas usaha (Undang-Undang Perseroan Terbatas) dan bukan termasuk para pihak dalam kontrak, sehingga PPN tidak bisa dibebankan/dikreditkan kepada Pemerintah;
 - ii) *Gas Producer*: bertentangan dengan Undang-Undang Migas Nomor 22 tahun 2001 dan Kontrak KKKS tidak dapat dibebani PPN dengan prinsip *Assume and Discharge* (PSC Contract dan Undang-Undang Migas Nomor 22 tahun 2001);
 - iii) Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding): bukan pemilik proyek LNG, namun sebagai *Seller LNG* yang menerima tagihan biaya pengolahan LNG dan membuat Tagihan kepada *Buyer LNG*;
 - iv) PT Arun NGL Co./PT Badak NGL Co. sebagai PKP wajib memungut PPN, namun tidak ada yang menanggung PPN



terutang karena pendiriannya yang bersifat bukan untuk tujuan Laba/Komersial sebagaimana lazimnya pembentukan Perseroan Terbatas bersifat komersial sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas.

- v) Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan karakteristik khusus ini dan setelah mendapat petunjuk/penegasan Dirjen Pajak melakukan Pembayaran dan pengkreditan PPN Masukan (Surat Dirjen Pajak S-1936/PJ.51/1992).
- e. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya berperan sebagai Operator sedangkan peran Regulator diambil alih oleh BP Migas, namun untuk pengelolaan administrasi LNG, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetap ditunjuk untuk melaksanakan sesuai penugasan dengan peran dan tanggung jawab. Dalam kedudukannya sebagai penjual sesuai penugasan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ditugaskan mengadakan perikatan kontrak pengadaan jasa pencairan gas alam. Pada intinya posisi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan aturan pengelolaan LNG tidak berubah dengan penegasan sebagai berikut:
 - i) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Nomor Kpts-2751/BP00000/2002-S0 tentang Kontrak-Kontrak Berjalan (*Existing Contracts*) tanggal 04 Desember 2002, menetapkan: menunjuk Pertamina sebagai Penjual Gas Bumi bagian Negara, selanjutnya melakukan pembicaraan lanjut dengan pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian jual beli gas bumi masing-masing mengenai perubahan-perubahan yang diperlukan untuk menjaga kontinuitas operasi dan kelangsungan perjanjian jual beli gas bumi;
Surat BP Migas ini menunjukkan peran Pertamina dalam skema *LNG Project* tidak berubah pada periode sebelum maupun sesudah pemberlakuan Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 atau peran Pertamina tidak berubah baik sebelum maupun setelah berstatus sebagai PT Pertamina (Persero);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii) Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1869 K/10/MEM/2007 tentang Pelaksanaan Kegiatan Bisnis *Liquefied Natural Gas* (LNG) Arun dan *Liquefied Natural Gas* (LNG) Badak tanggal 19 Juni 2007 menetapkan: BP MIGAS menguasai kepada PT Pertamina (Persero) untuk tetap bertindak sebagai pihak dalam perjanjian dan/atau kesepakatan antara *Trustee and Paying Agent Agreement, Loan Agreement, Supply Agreement, Agreement for Use, and Operation of Plant, Processing Agreement, Principles of Agreement, dan Producers Agreement*;

f. Pencatatan Laporan Keuangan pengelolaan LNG.

Berdasarkan skema pengelolaan LNG terdapat kondisi khas dalam pencatatan biaya pengolahan dan penghasilan penjualan LNG, dapat digambarkan sebagai berikut:

i) Dalam penugasan Pemerintah kepada Pertamina sebagai penjual LNG dan kewajiban lain yang melekat, biaya Pengolahan LNG dan penghasilan penjualan/Ekspor LNG merupakan bagian dari *Production Sharing Percentage* LNG Project sesuai dengan Badak LNG *Processing Agreement* Art. 13 dan Arun LNG *Processing Agreement* Art. 12 sehingga biaya Pengolahan LNG dan penghasilan penjualan/Ekspor LNG tidak dibukukan di Pertamina yang telah berlangsung sejak dimulainya LNG Project (baik sebelum dan sesudah Undang-Undang Migas Nomor 22 tahun 2001). Pencatatan biaya pengolahan/harga perolehan terkait Jasa Pengolahan LNG dan penyerahan Barang Kena Pajak (ekspor LNG) tidak dilakukan oleh Pertamina sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kondisi ini tidak sejalan dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPN Nomor 8 Tahun 1983 yang berbunyi:

"Setiap Pengusaha Kena Pajak diwajibkan mencatat semua jumlah harga perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dalam pembukuan perusahaan";

ii) Bahwa Pelaksanaan Pengolahan LNG dilakukan oleh PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. yang pembentukannya bukan untuk tujuan Laba/Komersial sebagaimana lazimnya pembentukan Perseroan Terbatas bersifat komersial sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pembentukan PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. lebih ditujukan kepada

Halaman 21 dari 52 halaman. Putusan Nomor 811/B/PK/PJK/2016

Nomor 811/B/PK/PJK/2016 – Rancangan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Perintah Naik Putusan – Tafsir Penafsiran

Disclaimer

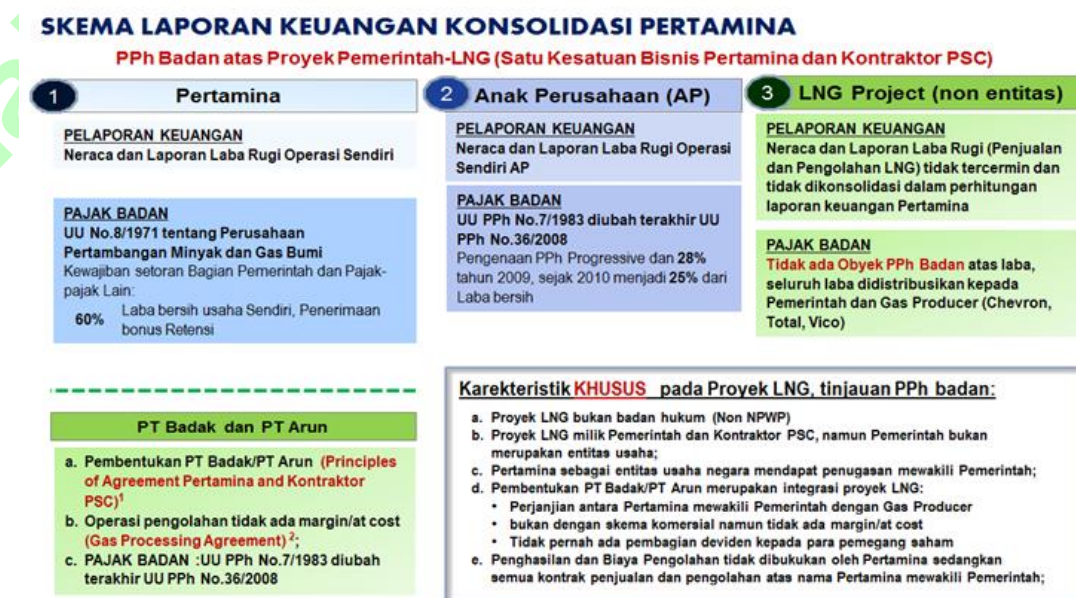
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengoperasian pabrik Pengolahan gas (*Liquefaction Plant*) sebagaimana diatur dalam *Principle of Agreement (PoA)* tanggal 20 April 1973.

PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatat penjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNG dilakukan dengan mekanisme *cash call* dan dana ini habis digunakan untuk operasi (*Non Profit*).

Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyek LNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema di bawah ini:



Gambar II. Skema Laporan Keuangan Konsolidasi Pertamina

2. Pembuktian Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Tinjauan fakta-fakta persidangan versus pertimbangan Majelis Hakim. Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan sebagian besar peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga terjadi pelanggaran asas keadilan dan kepastian hukum. Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Pengabaian fakta atas sifat khas skema proyek LNG

Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasan skema proyek LNG, meskipun dalam persidangan telah disampaikan fakta-fakta pembuktian sifat khas skema proyek LNG sebagai berikut:



1. Pendirian PT Badak¹

PT Badak NGL Co berdiri sejak tahun 1974 untuk mengoperasikan NGL (LNG) *Facilities* yang dimiliki oleh Menteri Keuangan *on behalf* Republik Indonesia. Dengan lokasi *plant* di Bontang Kalimantan Timur dan kantor Pusat di Jakarta. VICO, Total E&P Indonesia (Total) dan Chevron merupakan pihak yang akan menyediakan *Feed Gas* ke NGL *Plant*. Hasil Produksi LNG dipasarkan ke Jepang, Korea dan Taiwan, sedangkan hasil LPG dipasarkan ke pasar domestik, dan hasil *condensate* dikonsumsi untuk operasi *plant* atau dikembalikan kepada *producer*.

PT Badak NGL Co didirikan oleh Pertamina (atas nama Pemerintah), Huffco Incorporation, dan JILCO (Japan Indonesia LNG Company) dengan komposisi kepemilikan saham, Pertamina (55%), Huffco Inc.(30%) dan JILCO (15%). Dalam perjanjian kerjasama disebutkan bahwa PT Badak NGL Co tidak akan memperoleh keuntungan dari usaha ini. PT Badak NGL Co hanya menjadi salah satu mata rantai operasional LNG. Dengan demikian PT Badak NGL Co lebih merupakan *operating organization* yang bersifat *non-profit*.

Di tahun 1990 terjadi perubahan kepemilikan dan komposisi saham. Produsen gas Total Indonesia masuk menjadi *shareholder* baru. Dengan adanya restrukturisasi Huffco Incorporation menjadi VICO, selanjutnya susunan kepemilikan saham berubah menjadi Pertamina (55%), VICO (20%), Total E&P Indonesia (10%) serta JILCO (15%). Sementara itu, produsen gas lainnya Unocal Indonesia pun ikut berperan mensuplai gas ke kilang LNG Badak.

Struktur kepemilikan PT Badak NGL Co. per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

¹ Laporan Keuangan PT Badak NGL Tahun 2013



| Shareholders | Number of share issued | Percentage of ownership | Nominal | Value |
|---|------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|
| PT Pertamina (Persero) | 22 | 55% | 10,375 | 228,250,000 |
| Virginia Indonesia Company (VICO) | 8 | 20% | 10,375 | 83,000,000 |
| Japan Indonesia LNG Company Ltd (Jilco) | 6 | 15% | 10,375 | 62,250,000 |
| Total E&P Indonesia | 4 | 10% | 10,375 | 41,500,000 |
| TOTAL | 40 | 100% | 10,375 | 415,000,000 |

Tabel 1. Struktur kepemilikan PT Badak NGL Co. per 31 Desember 2013

PT Badak NGL Co merupakan perusahaan yang tidak memiliki pendapatan dan beban usaha semenjak perusahaan bertindak sebagai operator pabrik. Oleh karena itu, tidak dapat dilakukan perhitungan atas Tingkat Kesehatan PT Badak NGL Co karena tidak adanya Laporan Laba Rugi.

PT Badak NGL Co menerima dana operasi dari hasil penjualan LNG dan LPG sesuai dengan "*Amended And Restated Bontang Processing Agreement*" tanggal 09 Februari 1988 antara PT Badak NGL Co., PT Pertamina, VICO, Total E&P Indonesia, Unocal Ltd dan Indonesia Petroleum Ltd. Dalam perjanjian kerjasama tersebut, dinyatakan PT Badak NGL Co tidak akan memperoleh keuntungan dari usaha ini, sedangkan untuk beban usaha akan dialokasikan kepada *producer*.

PT Badak NGL Co diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan – PWC, dimana Laporan Keuangan 31 Desember 2013 PT Badak NGL Co dinyatakan dengan opini "Wajar dalam semua Hal yang Material".

Pendirian secara unik PT Badak NGL Co., pada 26 November 1974 berdasarkan *Shareholder Agreement* dengan tujuan dan kewenangan bertentangan dengan ketentuan Perseroan Terbatas pada umumnya sesuai dengan penjelasan peraturan di bawah ini:

a. KUH DAGANG

Sesuai Pasal 55 dalam KUHD menyebutkan jika para pengurus diwajibkan setiap tahun membuat laporan tentang laba dan rugi yang diperoleh atau diderita dalam tahun yang telah lampau. Laporan itu dapat dilakukan, baik



dalam rapat umum, maupun dengan mengirimkan suatu daftar kepada masing-masing persero, ataupun dengan menyediakan suatu perhitungan untuk diperiksa dan memberitahukannya kepada para persero, dengan jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam akta. (KUHD 52; Rv. 764 dan seterusnya);

b. UU PT 1995 Pasal 62 PT komersial, tentang Dividen Pasal 62

- (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS.
- (2) Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen.
- (3) Setelah 5 (lima) tahun, dividen yang tidak diambil dimasukkan ke dalam cadangan yang diperuntukkan untuk itu.
- (4) Pengambilan dividen sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

c. UU PT 40 Tahun 2007 tentang Dividen (Pasal 71)

- (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
- (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Karakteristik PT Badak NGL Co bertentangan dengan ketentuan umum Perseroan Terbatas, yaitu tidak mempunyai laporan Rugi-Laba karena PT Badak NGL Co tidak mencatat pendapatan (*Revenue*).

a. Sifat usaha dan Perlakuan Laba Usaha/dividen

i. Sifat Usaha *non profit*

PT berdasarkan perundang-undangan bersifat komersial, namun PT Badak NGL secara *de jure* dan



de facto bersifat *non profit* (bukti: laporan *audited*). Kondisi ini menunjukkan sifat khas proyek LNG, yakni PT Badak NGL Co., bentuk usaha yang secara yuridis bersifat komersial namun dalam implementasinya bersifat *non profit* atau setara bentuk Yayasan.

ii. Tidak ada Dividen kepada pemegang saham PT berdasarkan perundang-undangan membagikan dividen kepada para pemegang saham. Namun PT Badak NGL Co tidak pernah dan tidak bertujuan membagikan dividen kepada para pemegang saham (bukti: laporan *audited*).

b. Integrasi kegiatan PSC. Kegiatan bisnis LNG Kilang LNG Arun dan Badak merupakan bagian dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sesuai dalam *Section VI Point 6.2.2 PSC Agreement*:

"Should Pertamina and Contractors consider that the processing and utilization of Natural Gas is economical and choose to participate in the processing and utilization thereof, in addition to that used in secondary recovery operations, then the construction and installation of facilities for such processing and utilization shall be carried out pursuant to an approved Work Program."

iii. PT Badak NGL Co tidak melakukan jasa maklon Menurut PMK 244/PMK.03/2008 "Jasa maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa".

Fakta operasi PT Badak NGL Co.



Bahwa jasa pengolahan LNG bukan merupakan jasa maklon, sesuai penjelasan alur bisnis dari PT Badak NGL Co.

2. Pendirian PT Arun²

PT Arun NGL Co. (Arun) berdiri sesuai dengan akta notaris Than Thong Kie, S.H. Nomor 22 tanggal 16 Maret 1974. Struktur kepemilikan saham per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

| Shareholders | Number of share issued | Percentage of ownership | Value |
|---|------------------------|-------------------------|------------|
| PT Pertamina (Persero) | 110 | 55% | 110 |
| Exxon Mobil LNG Indonesia Inc. | 60 | 30% | 60 |
| Japan Indonesia LNG Company Ltd (JILCO) | 30 | 15% | 30 |
| TOTAL | 200 | 100% | 200 |

Tabel 2. Struktur kepemilikan PT Arun NGL Co. per 31 Desember 2013

Input gas PT Arun NGL Co. berasal dari PT Pertamina (Persero), Exxon Mobil Oil Indonesia dan afiliasinya, yang juga disebut sebagai “*Producer*”. Hasil produksi LNG dipasarkan ke Jepang dan Korea, hal ini terkait dengan LNG *Sales Contract* antara Pertamina, beberapa pembeli dari Jepang yang diwakili oleh Japan Indonesia LNG Company Ltd (“JILCO”) dan pembeli dari Korea (Korean Gas Corporation).

Sesuai dengan perjanjian tanggal 26 Agustus 1974, “*Agreement of Use And Operation of Plant*” antara Pertamina dan PT Arun NGL Co., yang menyatakan bahwa Arun bertindak sebagai operator fasilitas LNG tersebut, Arun tidak memiliki pendapatan usaha ataupun beban usaha, sehingga tidak memiliki laporan Laba Rugi. Perusahaan mendapatkan sumber dana sesuai dengan ketentuan Arun LNG dan LPG *Processing Agreement*, antara Perusahaan, Pertamina dan Exxon Mobil, sedangkan penggantian biaya operasi (*at cost*) dibayarkan dari *revenue* LNG sebagai *cost of sales*.

PT Arun NGL Co juga memproduksi *condensate* untuk *producer*, sesuai dengan “*Condensate processing agreement*”

² Laporan Keuangan PT Arun NGL Tahun 2013



dengan ExxonMobil. Perusahaan mendapatkan sumber dana berdasarkan perhitungan *cost of service basis* melalui skema *cost recovery*.

Pada tahun 1999, PT Arun NGL Co. melakukan kontrak mengoperasikan NSO *onshore treating facilities* dengan gas berasal *North Sumatra Offshore* "NSO", yang dioperasikan oleh Mobil Exploration Indonesia Inc (MEII) berdasarkan *Production Sharing Contract* (PSC). Sumber dana berasal dari pihak MEII sesuai dengan perhitungan *cost of service basis*.

PT Arun NGL Co. diaudit oleh KAP Siddharta & Widjaja-KPMG, dimana Laporan Keuangan 31 Desember 2013 PT Arun NGL Co dinyatakan dengan opini "Wajar dalam semua Hal yang Material".

Terkait dengan tidak dilakukannya pencatatan PT Arun NGL Co dan PT Badak NGL Co dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Pertamina dikarenakan sesuai dengan Kesimpulan dari *Accounting Position Paper* Nomor Pos-003/H00000/2011-S0 tentang Akuntansi Atas Investasi Pertamina di PT Arun NGL Co dan PT Badak NGL Co dengan tanggal berlaku 01 Januari 2010, yang menyatakan bahwa:

- a. Pertamina tidak memiliki pengendalian seperti yang dipersyaratkan dalam PSAK 4 sehingga PT Arun NGL Co dan PT Badak NGL Co tidak memenuhi persyaratan sebagai anak perusahaan.
- b. Pertamina tidak memiliki pengaruh yang signifikan seperti yang disyaratkan dalam PSAK 15 sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai entitas asosiasi.
- c. Investasi Pertamina dalam bentuk penyertaan saham dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual yang digunakan dalam nilai wajar, namun sesuai dengan PSAK 50 dan 55 bahwa nilai wajar tidak dapat digunakan jika tidak dapat menghasilkan informasi yang andal, sehingga Pertamina mencatat investasi pada Biaya Perolehan.

2.2 Pengabaian perundang-undangan proyek LNG dan Penegasan Fiskal

Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan hukum komersial, perundang-undangan dan penegasan fiskal dalam pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa koreksi kredit Pajak Masukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masa Agustus 2010 sebesar Rp18.607.407.223,00.

Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukum komersial, landasan hukum perundang-undangan dan penegasan fiskal yang menjadi latar belakang pengelolaan proyek LNG yang diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 Landasan Hukum Komersial

- i) *Principle of Agreement (PoA)*, yaitu Perjanjian pokok antara Pertamina dan KKKS yang mengatur pelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkan diwilayah kerja masing-masing KKKS terkait, mencakup pembagian tugas dari masing-masing pihak.
- ii) *Agreement for Use and Operation of Plant*, yaitu kesepakatan antara Pertamina (pemilik kilang) dengan PT Badak NGL Co (operator kilang) yang mengatur tentang pengoperasian dan pemanfaatan kilang LNG Badak oleh PT Badak NGL Co.
- iii) *Processing Agreement*, yaitu Perjanjian antara Pertamina dan KKKS dengan PT Badak NGL Co yang mengatur kegiatan pemrosesan gas bumi yang di *supply* KKKS menjadi LNG oleh PT Badak NGL Co hingga dimuat ke kapal LNG.
- iv) *Trustee and Paying Agent Agreement*, yaitu Perjanjian antara Pertamina dan KKKS dengan *Trustee Bank* untuk menerima uang hasil penjualan LNG dan mendistribusikannya kepada pihak-pihak terkait yang ditunjuk oleh Pertamina dengan kesepakatan KKKS.
- v) *Loan Agreement*
Perjanjian antara Pertamina dengan JILCO (konsorsium pembeli LNG Jepang) dan Bank Indonesia mengenai pinjaman dana untuk pembangunan kilang LNG *Train A* dan *B*, dan pengembalian pinjaman tersebut disisihkan dari *revenue* LNG. Untuk *Train C* dan *D*, Pertamina mendapatkan dana pembangunan kilang LNG *Train C* dan *D* dari *Buyer* dalam bentuk *advance payment* dan pengembalian pinjaman tersebut disisihkan dari *revenue*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LNG. Untuk *Train E, F, G, dan H* Pertamina mendapatkan dana pembangunan kilang dari Bank *Trustee*. Bank *trustee* mendapatkan dana pinjaman dari para *lender* melalui *Loan Agreement* dan pengembalian pinjaman tersebut disisihkan dari *revenue* LNG.

vi) **Producer Agreement.**

Perjanjian *in favor of Lender* antara Pertamina dan KKKS untuk memberikan jaminan kepada *Lender Trustee* bahwa dana yang diberikan oleh *Lender* kepada *Trustee* akan dipergunakan untuk pembangunan kilang LNG oleh Pertamina guna memproses gas yang diproduksi oleh KKKS sesuai dengan *Commitment Sales Contract*.

vii) **Supply Agreement**

Perjanjian antara Pertamina dan KKKS yang mengatur dan menjamin *supply* gas dari gas *producers* kepada Pertamina dalam rangka pemenuhan kebutuhan gas untuk pelaksanaan kontrak penjualan LNG, dan penyerahan LNG bagian KKKS kepada Pertamina untuk dijual.

2.2.2 Penegasan Fiskal

- i) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 dan Pengumuman Dirjen Pajak Nomor PENG-139/PJ.63/1989 yang mengatur pengenaan PPN telah diperluas sedemikian rupa atas jenis-jenis jasa tertentu selain jasa pemborongan. Akibat perluasan tersebut jasa pengolahan (jasa *processing*) yang dilakukan oleh PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co merupakan jasa kena pajak yang menjadi objek pengenaan PPN. Atas penyerahan jasa pengolahan (jasa *processing*) dari PT Arun NGL Co dan PT Badak NGL Co kepada Pertamina terutang PPN.
- ii) Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-65/PJ.51/1993 tanggal 18 Januari 1993, perihal Petunjuk Tatacara Pelaksanaan PPN LNG/LPG.
- iii) Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 tanggal 30 Oktober 1992, menyatakan



bahwa PPN atas jasa Pengolahan LNG/LPG merupakan Pajak Keluaran bagi PT Arun NGL Co dan PT Badak NGL Co dan merupakan Pajak Masukan Pertamina.

2.3 Pengabaian Fakta Historis Implementasi PPN Jasa Pengelolaan LNG

Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan fakta historis dan latar belakang pengenaan PPN jasa pengelolaan LNG dengan uraian sebagai berikut:

2.3.1 Historis Pengenaan PPN Jasa Pengelolaan LNG

PT Arun NGL Co dan PT Badak NGL Co didirikan dengan tugas untuk mengolah gas alam milik KPS dan Pemerintah (diwakili oleh Pertamina) menjadi LNG dan tidak ada tujuan untuk komersil atau mencari laba. Proses pencairan ini termasuk ruang lingkup operasional LNG secara keseluruhan.

Berdasarkan Surat Menteri Muda Keuangan Nomor S-721/PJ.3/1989 perihal PPN atas LNG/LPG, berisi poin-poin sebagai berikut:

- i) LNG/LPG yang diproses oleh PT Arun NGL Co dan PT Badak NGL Co ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak. Karenanya PT Arun NGL Co dan PT Badak NGL Co harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- ii) Pengukuhan menjadi Pengusaha Kena Pajak tersebut pada butir 1 ditetapkan berlaku sejak tanggal 01 Juni 1989.
- iii) Dengan berlakunya pengukuhan sejak tanggal 01 Juni 1989 maka atas ekspor LNG/LPG terutang PPN dengan tarif 0%. Pajak Masukan yang dibayar untuk menghasilkan LNG/LPG sejak tanggal 01 Juni 1989 dapat dikreditkan atau diminta kembali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988.

Sesuai surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 tanggal 30 Oktober 1992 Perihal PPN atas



PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. disarikan sebagai berikut:

- i) PT Arun NGL Co dan PT Badak NGL Co menerima bahan baku (gas alam) dari KPS/Pertamina untuk diolah menjadi barang jadi. Penyerahan jasa Pengolahan LNG/LPG dari PT Arun NGL Co dan PT Badak NGL Co kepada Pertamina terutang PPN. Dasar Pengenaan Pajak atas jasa pengolahan tersebut adalah nilai penggantian yang diterima dari Pertamina.
- ii) PPN atas jasa pengolahan merupakan Pajak Keluaran bagi PT Arun NGL Co dan PT Badak NGL Co dan Pajak Masukan bagi Pertamina.
- iii) Oleh karena ekspor LNG/LPG merupakan barang milik Pertamina dan dilakukan oleh Pertamina, maka Pajak Masukan yang terkait dengan ekspor LNG/LPG tersebut hanya dapat diminta kembali (restitusi) oleh Pertamina.
- iv) Pertamina berhak mengkreditkan/meminta restitusi Pajak Masukan yang berkaitan dengan ekspor LNG/LPG yang diolah oleh PT Arun NGL Co dan PT Badak NGL Co.

Kata Pertamina dalam surat Dirjen Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 mengandung 2 (dua) arti:

- i) Mewakili Pemerintah, karena pemilik gas alam dan barang jadi (LNG/LPG) adalah Pemerintah. Pertamina sebagai mewakili Pemerintah tidak pernah membuat Laporan PPN.
- ii) Sebagai Operasi Sendiri, Proses pengkreditan (restitusi) hanya dapat diproses di Pertamina sebagai Operasi Sendiri. Pertamina secara Operasi Sendiri tidak pernah mencatat adanya pembelian dan penjualan LNG dalam pembukuan perusahaan.

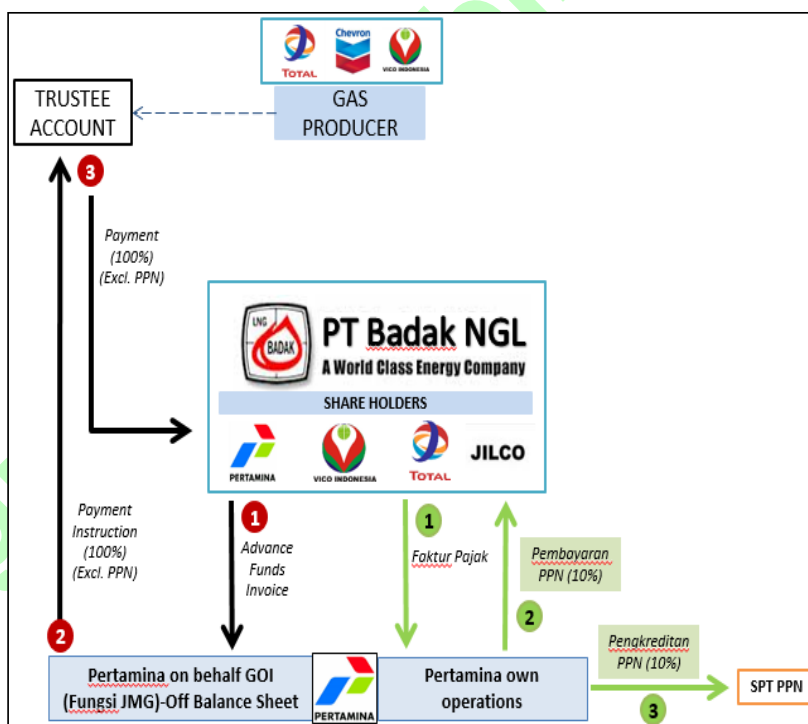
Untuk memenuhi amanat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-721/PJ.03/1989 tanggal 29 Mei 1989 dan Nomor S-1936/PJ.51/1992 tanggal 30 Oktober 1992, yang menegaskan jasa pengolahan terutang PPN, maka diterbitkanlah SK Direktur Utama Pertamina Nomor KPTS-054/C00000/93-B1 tanggal 05 Maret 1993 tentang Petunjuk



Pelaksanaan dan tata cara Pajak Pertambahan Nilai LNG/LPG. Salah satu prosedur dalam pedoman tersebut adalah Pertamina melakukan transfer/pembayaran PPN Jasa Pengolahan kepada PT Arun NGL Co dan PT Badak NGL Co dan mencatat sebagai Pajak Masukan. Pengelolaan Kas/Bank dan pencatatan pembukuan dilakukan oleh PT Arun NGL Co dan PT Badak NGL Co.

2.3.2 Alur Pembayaran *Cash Advance* dan Penerbitan Faktur Pajak PPN Jasa Pengolahan LNG

SKEMA KHAS PENUGASAN PEMERINTAH



Gambar III. Alur Pembayaran *Cash Advance* dan Penerbitan Faktur Pajak PPN Jasa Pengolahan LNG

2.3.2.1 Penjelasan dan Dasar Penagihan dan Pembayaran *Cash Advance* Jasa Pengolahan LNG (tanpa PPN).

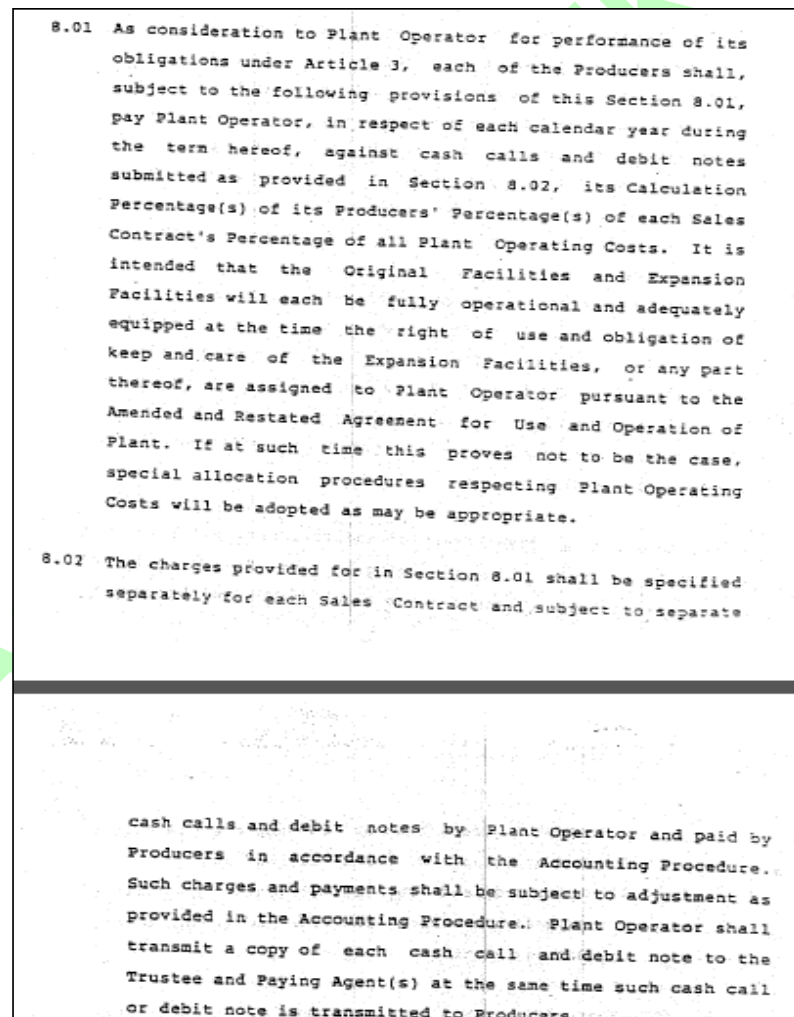
- PT Badak NGL Co menerbitkan *Advance Funds Invoice* atas *cash advance* jasa pengolahan LNG yang ditujukan kepada Pertamina dan Gas



Producers (Virginia Indonesia Company, Total E&P Indonesia, dan Chevron Indonesia Company).

Invoice tersebut diterbitkan atas dasar *Article 8* dan *Article 2 Exhibit A Badak LNG (Bontang LNG) Processing Agreement (Amended & Restatted, 1988)*.

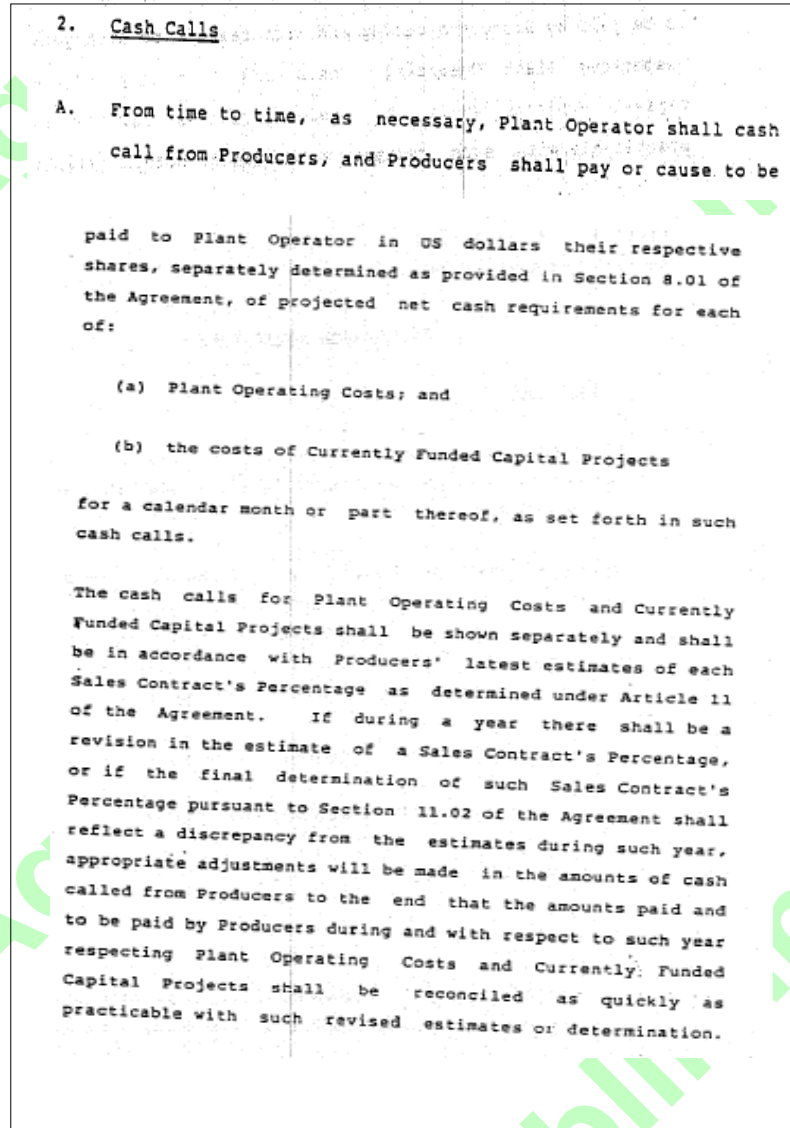
Article 8 Badak LNG (Bontang LNG) Processing Agreement (Amended & Restatted, 1988):



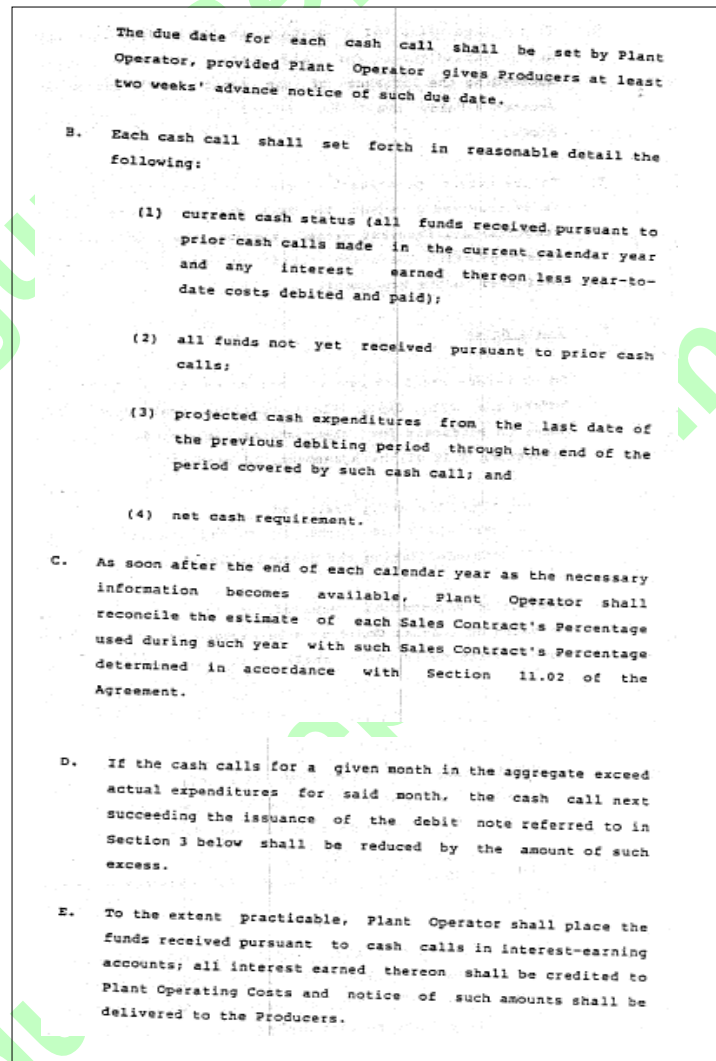
Gambar IV. Article 8 Badak LNG (Bontang LNG) Processing Agreement (Amended & Restatted, 1988):



*Article 2 Exhibit A Badak LNG (Bontang LNG) Processing Agreement
(Amended & Restatted, 1988):*



Gambar V. Article 2 Exhibit A Badak LNG (Bontang LNG) Processing Agreement (Amended & Restatted, 1988):

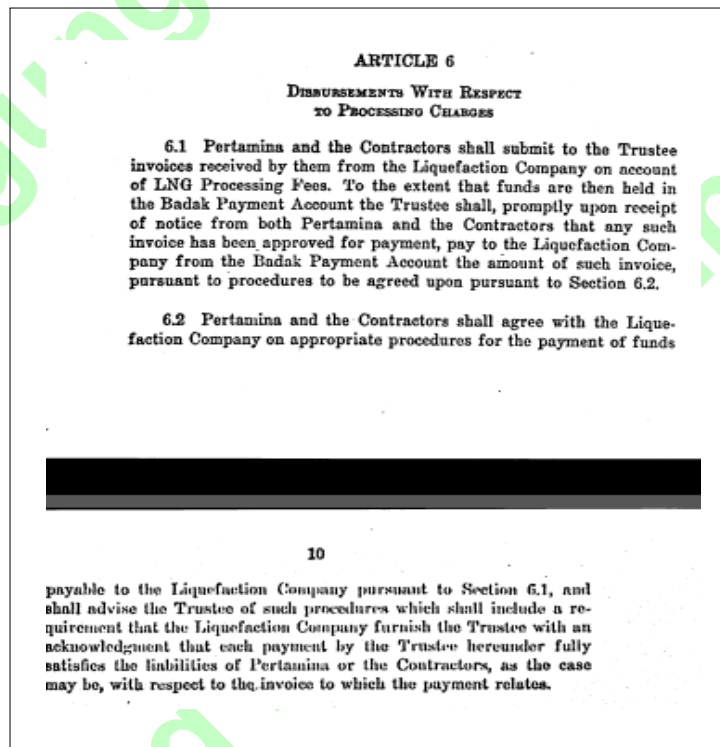


Gambar VI. Lanjutan Article 2 Exhibit A Badak LNG (Bontang LNG) Processing Agreement (Amended & Restated, 1988):

- b. Pertamina (selaku Fungsi *Joint Management Group* (JMG) sesuai Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor KPTS-79/C0000/88-B1 tanggal 20 Juni 1988) menerbitkan *Payment Instruction* kepada HSBC Bank USA, N.A., dan HSBC Bank Hongkong selaku pengelola *Trustee Account* untuk melakukan transfer pembayaran *Advance Funds Invoice* ke rekening Bank Mandiri milik PT Badak NGL Co atas *cash advance* jasa pengolahan LNG.



Payment Instruction tersebut diterbitkan atas dasar *Trustee and Paying Agent Agreement* (1974):



Gambar VII. Trustee and Paying Agent Agreement (1974):

- c. HSBC Bank USA, N.A. dan HSBC Bank Hongkong selaku pengelola *Trustee Account* melakukan transfer pembayaran *Advance Funds Invoice* sesuai dengan *Payment Instruction*.

2.3.2.2 Penjelasan Penerbitan Faktur Pajak PPN Jasa Pengolahan LNG

PT Badak NGL Co menerbitkan Faktur Pajak jasa pengolahan LNG yang ditujukan kepada Pertamina. Adapun alasan Pertimbangan Hukum Pembebanan PPN Pengolahan LNG kepada Pertamina:

- Pemerintah: Bukan entitas usaha (Undang-Undang Perseroan Terbatas) dan bukan termasuk para pihak dalam kontrak, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN tidak bisa dibebankan/dikreditkan kepada Pemerintah;

- *Gas Producer*: bertentangan dengan Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 dan Kontrak KKKS tidak dapat dibebani PPN dengan prinsip *Assume and Discharge* (PSC Contract dan Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001);

Pertamina bukan pemilik proyek LNG, namun sebagai *Seller LNG* yang menerima tagihan biaya pengolahan LNG dan membuat Tagihan kepada *Buyer LNG*.

PT Arun NGL Co/PT Badak NGL Co sebagai PKP wajib memungut PPN, namun tidak ada yang menanggung PPN terutang.

Pertamina berdasarkan karakteristik khusus ini dan setelah mendapat petunjuk/penegasan Dirjen Pajak melakukan Pembayaran dan pengkreditan PPN Masukan (Surat Dirjen Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992).

Faktur Pajak tersebut diterbitkan atas dasar Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-65/PJ.51/1993 tanggal 18 Januari 1993 dan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor KPTS-054/C0000/93-B1 tanggal 05 Maret 1993.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Butir III KPTS-054/C0000/93-B1

2. Pelaksanaan Administrasi Pajak Keluaran di PT. ARUN NGL.Co dan PT. BADAK NGL.Co.
 - 2.1. Faktur Pajak atas penyerahan jasa pengolahan (jasa processing) LNG/LPG dibuat oleh Bagian Keuangan PT. ARUN NGL.Co di Jakarta dan Bagian Keuangan PT. BADAK NGL.Co di Jakarta selambat-lambatnya satu hari kerja setelah Cash Advance yang terakhir diterima dalam suatu bulan.
 - 2.2. Faktur Pajak lembar kesatu (asli) dikirim dengan surat pengantar kepada Divisi Akuntansi Dit. Keuangan PERTAMINA dengan tembusan surat pengantar dilengkapi copy Faktur Pajak kepada Divisi Perbendaharaan dan Dinas Akuntansi Umum selambat - lambatnnya satu hari kerja sebelum akhir bulan pada Masa Pajak yang sama.

III. PAJAK KELUARAN

1. Pajak Keluaran PT. ARUN NGL. Co dan PT. BADAK NGL. Co.

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan oleh PT. ARUN NGL. Co dan PT. BADAK NGL. Co pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa. Kena Pajak.

- 1.1. Atas penyerahan jasa pengolahan (jasa processing) gas alam menjadi LNG/LPG dikenakan PPN dengan tarif 10 % dari Dasar Pengenaan Pajak sebagai Pajak Keluaran PT. ARUN NGL. Co dan PT. BADAK NGL. Co. sesuai butir 4 Bab II Ketentuan Umum dan untuk itu harus diterbitkan Faktur Pajak. Jenis Faktur Pajak yang diterbitkan dapat berupa Faktur Pajak Gabungan.

Gambar VIII.KPTS-054/C0000/93-B1

Dalam melaksanakan ketentuan mengenai pengenaan PPN atas penyerahan jasa pengolahan LNG tersebut, PT Badak NGL Co. menerbitkan Faktur Pajak. Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN) menyebutkan bahwa:

“Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

1. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
5. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
6. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
7. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.”

Bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT Arun NGL Co dan PT Badak NGL Co telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Berikut adalah salah satu contoh bentuk Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT Badak NGL Co kepada Pertamina;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran I B
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-549/PJ.2000
Tanggal : 29 Desember 2000
Lembar ke - 1 : Untuk Pembeli BKP / Penerima JKP
sebagai bukti Pajak Masukan

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000.07.00000209

Pengusaha Kena Pajak

Nama : PT. BADAK NGL.
Alamat : WISMA NUSANTARA Lt. 9 Jl. M.H. Thamrin No. 59 Jakarta
NPWP : 01-318-062-5-051-000
Tanggal Pengukuhan PKP : 10 Juli 1989

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : PERTAMINA
Alamat : Jl. Perwira 1A - Jakarta Pusat
NPWP : 01.001.664.5-051.000 NPPKP: 01.001.664.5-051.000

| No. Urut | Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak | Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn | |
|---|--|--|----------------|
| | | Valas *) | Rp. |
| 1 | Cash Advance PPN Jasa Pengolahan LNG/LPG untuk Bulan Mei 2007 periode tgl. 10 -11 Mei 2008 | US\$ 7,500,000 | 67,966,500,000 |
| Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *) | | US\$ 7,500,000 | 67,966,500,000 |
| Dikurangi Potongan Harga | | | |
| Dikurangi Uang Muka yang telah diterima | | | |
| Dasar Pengenaan Pajak | | | 67,966,500,000 |
| PPN = 10% X Dasar Pengenaan Pajak | | | 6,796,650,000 |

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

| TARIF | DPP | PPn. BM |
|--------|-----|---------|
| % | Rp. | Rp. |
| % | Rp. | Rp. |
| % | Rp. | Rp. |
| % | Rp. | Rp. |
| Jumlah | | Rp. |

Catatan : 9,062.2 /US\$1
Kurs : Rp.

Jakarta, tanggal 31 Mei 2007

John T. Davis/Finance Coordinator
Nama :
Jabatan :

*) Diliis apabila penyerahan menggunakan mata uang asing
**) Coret yang tidak perlu

Gambar IX. Faktur Pajak Standar PPN Jasa Pengolahan LNG dari PT Badak NGL Co Kepada Pertamina

Atas Faktur Pajak yang diterbitkan kepada Pertamina tersebut, kemudian Pertamina melakukan pembayaran PPN melalui transfer bank kepada rekening PT Arun NGL Co dan PT Badak NGL Co.

2.3.3 Pengkreditan PPN Jasa Pengolahan LNG oleh Pertamina

Faktur Pajak atas nama Pertamina yang diterbitkan PT Arun NGL Co dan PT Badak NGL Co merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari ketentuan hukum komersial yang



disepakati oleh para pihak dan merupakan Faktur Pajak yang sah berdasarkan ketentuan formal hukum perpajakan yang berlaku dengan penjelasan sebagai berikut:

2.3.3.1 Ketentuan Formal Hukum Komersial

- a. Berdasarkan *Principles of Agreement* (PoA) tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokok antara Pertamina dan Kontraktor PSC yang mengatur pelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkan di Badak *Field*. Kontraktor PSC mengembangkan lapangan dan memproduksi gas, Pertamina membangun kilang LNG melalui *its own financing arrangement*, dan melakukan negosiasi dan menjalankan kontrak terkait dengan penjualan LNG. Pertamina dan Kontraktor secara bersama-sama akan membentuk *business entity*.
- b. *Agreement for Use and Operation of Plant* tanggal 26 Agustus 1974 yaitu kesepakatan antara Pertamina dengan PT Badak NGL Co. Dalam *Agreement* tersebut, Pertamina selaku pemilik kilang menunjuk PT Badak NGL Co sebagai operator kilang. Dengan demikian, jelas bahwa secara perjanjian yang disepakati bersama, hubungan komersial PT Badak NGL adalah hubungan dengan Pertamina, bukan hubungan dengan pihak lain selain Pertamina.
- c. Merujuk pada Bontang LNG *Processing Agreement* tanggal 01 Juli 1983 dan *Agreement for Use and Operation of Plant* antara PT Badak NGL Co dan Pertamina tanggal 26 Agustus 1974, Pertamina menerima LNG yang di proses oleh PT Badak NGL yang selanjutnya dikirimkan kepada *buyer*. Pembiayaan pemrosesan LNG yang dilakukan oleh PT Badak NGL Co dilakukan dengan mekanisme *cash call*, yakni dengan mengirimkan dokumen penagihan beserta kelengkapannya kepada Pertamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang menerima jasa pengolahan LNG dari PT Badak NGL Co. Pihak penerima jasa pengolahan LNG tersebut akan membayarkan jumlah sesuai dengan *cash call* yang telah diajukan dan disetujui.

- d. Pertamina sebagai entitas usaha milik negara diberikan penugasan untuk menjual Gas Bumi bagian Negara berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1869 K/10/MEM/2007 tanggal 19 Juni 2007 (KEP ESDM) tentang pelaksanaan kegiatan bisnis *Liquefied Natural Gas* (LNG) Arun dan *Liquefied Natural Gas* (LNG) Badak menetapkan sebagai berikut:

Kesatu: Menetapkan Pertamina sebagai pelaksana pengelolaan aset Kilang LNG Arun dan Kilang LNG Badak yang pengoperasiannya masing-masing dilakukan oleh PT Arun NGL Co dan Company dan PT Badak NGL Company.

Kedua: Dalam pelaksanaan pengelolaan aset Kilang LNG Arun dan Kilang LNG Badak sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, Badan Pelaksana menguasai kepada Pertamina untuk tetap bertindak sebagai pihak dalam perjanjian dan/atau kesepakatan, antara lain *Trustee and Paying Agent Agreement, Loan Agreement, Supply Agreement, Agreement for Use and Operation of Plant, Processing Agreement, Principles of Agreement, dan Producers Agreement*, dan selanjutnya Badan Pelaksana menindaklanjuti secara tertulis pelaksanaan penguasaan kepada Pertamina Dan seterusnya ...;

Dalam KEP ESDM tersebut dalam bagian "Menimbang" butir d dinyatakan hal sebagai berikut:

Halaman 43 dari 52 halaman. Putusan Nomor 811/B/PK/PJK/2016

Nomor 811/B/PK/PJK/2016 – Rangka Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Perintah Naikah Putusan – Tafsir Fقه

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan kegiatan bisnis LNG Arun dan LNG Badak, perlu adanya penetapan mengenai pelaksanaan bisnis LNG Arun dan LNG Badak dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral”. Dengan demikian, dengan adanya KEP ESDM tersebut, terdapat kepastian hukum bahwa pihak yang bertindak dalam perjanjian dan/atau kesepakatan adalah Pertamina sehingga sudah sewajarnya dan benar bahwa PT Badak NGL Co menerbitkan faktur pajak kepada Pertamina selaku pihak dalam perjanjian dan/atau kesepakatan.

2.3.3.2 Ketentuan Formal Hukum Perpajakan

- a. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor S-721/PJ.3/1989 tanggal 29 Mei 1989 perihal PPN atas LNG/LPG, PT Badak NGL Co dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- b. Surat Direktur Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1936/PJ.51/1992 tanggal 18 Januari 1993, Perihal PPN atas PT Arun NGL dan PT Badak NGL Co bahwa penyerahan jasa pengolahan LNG/LPG dari PT Arun NGL Co dan PT Badak NGL Co kepada Pertamina terutang PPN. Lebih lanjut diatur bahwa PPN yang terutang diberlakukan sesuai ketentuan umum yaitu PPN dikenakan dan disetor oleh PT Arun NGL Co dan PT Badak NGL Co. PPN atas jasa pengolahan LNG/LPG tersebut merupakan Pajak Keluaran Bagi PT Arun NGL Co dan PT Badak NGL Co dan Merupakan Pajak Masukan Pertamina.



c. Surat Direktur Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor S-65/PJ.51/1993 tanggal 18 Januari 1993, Perihal Petunjuk Tatacara Pelaksanaan PPN LNG/LPG menyatakan bahwa atas penyerahan jasa pengolahan/ *processing* gas alam menjadi LNG/LPG terutang PPN 10%. Pada Pokok Surat ini menyebutkan bahwa LNG/LPG ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak dan atas ekspor LNG/LPG terutang PPN dengan tarif 0%, Pajak Masukan yang dibayar untuk menghasilkan LNG/LPG sejak 1 Juni 1989 dapat dikreditkan atau diminta kembali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1988.

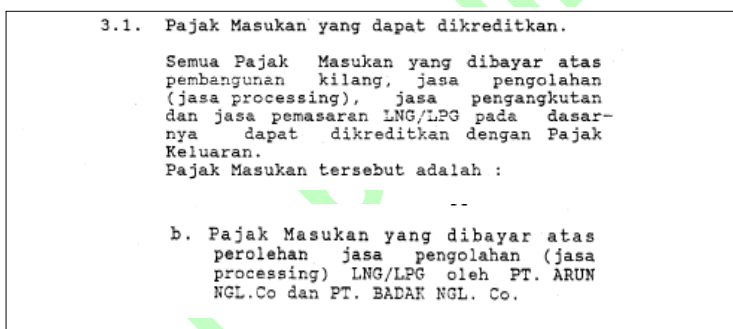
Dengan mempertimbangkan surat-surat Direktur Jenderal Pajak di atas, Pertamina menerbitkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara Nomor KPTS-054/C0000/93-B1, tanggal 05 Maret 1993 tentang pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan Tatacara Pajak Pertambahan Nilai LNG/LPG pada semua kegiatan Pertamina, PT Arun NGL Co dan PT Badak NGL Co. Surat Keputusan Direksi Pertamina tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1988 dan pengumuman Dirjen Pajak Nomor PENG-139/PJ.63/1989 pengenaan PPN telah diperluas sedemikian rupa atas jenis-jenis jasa tertentu selain jasa Pemborongan. Akibat perluasan tersebut jasa pengolahan (jasa *processing*) yang dilakukan oleh PT Arun NGL Co dan PT Badak NGL Co merupakan jasa kena pajak yang menjadi objek pengenaan PPN. Atas Penyerahan Jasa Pengolahan (Jasa *Processing*) dari PT Arun NGL



Co dan PT Badak NGL Co kepada Pertamina Terutang PPN.

Dalam Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor KPTS-054/C0000/93-B1 tanggal 05 Maret 1993 tersebut juga disebutkan bahwa Pertamina mengkreditkan PPN Masukan Jasa Pengolahan LNG sesuai Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 tanggal 30 Oktober 1992, Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-65/PJ.51/1993 tanggal 18 Januari 1993.

Butir IV KPTS-054/C0000/93-B1



Gambar X. KPTS-054/C0000/93-B1

Pengkreditan PPN Jasa Pengolahan LNG oleh Pertamina telah memenuhi ketentuan formal hukum komersial dan ketentuan formal hukum perpajakan sebagaimana penjelasan di atas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengkreditan PPN Masukan pengolahan LNG oleh Pertamina telah memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum sejak tahun 1992, hal lain yang memperkuat skema khas proyek LNG adalah peran Pertamina semata-mata sebagai bentuk penugasan Pemerintah dengan kondisi di luar kuasa Pertamina yang telah disetujui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Surat Dirjen Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 yang sampai dengan sekarang surat tersebut belum pernah dicabut.



2.4 Pengabaian asas keadilan dan kepastian hukum sebagai pilar utama perundang-undangan pajak

Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan asas keadilan dan kepastian hukum perundang-undangan pajak. Fakta pengabaian ini adalah Majelis Hakim mengabaikan inkonsistensi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan baru melakukan koreksi setelah 36 tahun implementasi.

Pelaksanaan skema LNG dengan Pembayaran dan pengkreditan PPN oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesungguhnya telah dilaksanakan/diterima oleh instansi pemerintah dan kontraktor terkait, meliputi:

- i) Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Pajak, keduanya Kementerian Keuangan;
- ii) Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS saat ini SKK MIGAS);
- iii) Direktorat Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM);
- iv) Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS);

Dengan Putusan Pengadilan Pajak ini, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan inkonsistensi Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidak pernah mengubah/merevisi/membatalkan surat surat Nomor S-1936/PJ.51/1992 tanggal 30 Oktober 1992 perihal PPN atas PT Arun NGL Co dan PT Badak NGL Co. Penerbitan surat tersebut menunjukkan bahwa project LNG diimplementasikan dengan skema khas dengan melibatkan pihak Pemerintah, KKKS, dan Pertamina.
- b. Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidak pernah melakukan koreksi PPN Masukan LNG dalam setiap pemeriksaan pajak. Pada tahun 2013, setelah 21 tahun terhitung sejak tahun 1992, Dirjen Pajak baru melakukan koreksi PPN masukan LNG melalui proses Verifikasi dan menerbitkan SKPKBT kepada Pertamina;
- c. Dalam skema khas Pertamina telah membuktikan bahwa seluruh kewenangan dan penetapan skema *project* LNG dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Pertamina hanya



mendapatkan penugasan manajerial penjualan LNG secara ketentuan pajak merujuk pada surat Nomor S-1936/PJ.51/1992 sebagai solusi Pemerintah untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya atas *project* LNG ini. Berdasarkan pembuktian dan fakta hukum tersebut maka secara yuridis dan substantif pengkreditan PPN Masukan pengolahan LNG oleh Pertamina telah memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum sejak tahun 1992, hal lain yang memperkuat skema khas proyek LNG adalah peran Pertamina semata-mata sebagai bentuk Penugasan Pemerintah dengan kondisi di luar kuasa Pertamina yang telah disetujui sendiri oleh Dirjen Pajak-Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Surat Dirjen Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 yang sampai dengan sekarang surat tersebut belum pernah dicabut. Adapun atas implementasi Surat Dirjen Pajak Nomor S-1936/PJ.51/1992 tidak pernah ada koreksi hingga tahun 2013. Berikut adalah gambaran perlakuan PPN Jasa Pengolahan LNG dari proyek LNG berdiri hingga sekarang.

SKEMA PENUGASAN BISNIS LNG
TINJAUAN AZAS KEADILAN & KEPASTIAN HUKUM



Gambar XI. Tinjauan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum-Skema Penugasan LNG

III. KESIMPULAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63410/PP/M.IIA/16/2015 tanggal 08 September 2015, dimohonkan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung yang telah dipaparkan, diuraikan, dilakukan pembuktian berdasarkan fakta dan data sebagaimana disebutkan di dalam surat permohonan Peninjauan Kembali ini, disusun kesimpulan permohonan Peninjauan Kembali atas amar putusan Majelis Pengadilan Pajak atas koreksi Pengkreditan Pajak Masukan PPN jasa pengolahan LNG dimohonkan peninjauan kembali dengan alasan nyata-nyata terdapat kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta dan data argumentasi serta keliru memahami substansi kekhasan bisnis LNG, kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim meliputi;

1. Pengabaian fakta atas sifat khas skema proyek LNG. Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasan skema proyek LNG;
2. Pengabaian perundang-undangan proyek LNG dan Penegasan Fiskal. Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan hukum komersial, perundang-undangan dan penegasan fiskal dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa koreksi kredit Pajak Masukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masa Agustus 2010 sebesar Rp18.607.407.223,00;
3. Pengabaian Fakta Historis Implementasi PPN Jasa Pengelolaan LNG. Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan fakta historis dan latar belakang pengenaan PPN jasa pengelolaan LNG;
4. Pengabaian asas keadilan dan kepastian hukum sebagai pilar utama perundang-undangan pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan asas keadilan dan kepastian hukum perundang-undangan pajak dengan menyetujui inkonsistensi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

Pengabaian peraturan perundang-undangan, ketentuan perpajakan dan asas keadilan dan kepastian hukum merupakan kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak adil dan merugikan bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).

Peran Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Peninjauan Kembali) dari sebelum berlakunya Undang-Undang Migas Nomor 22 tahun 2001 hingga saat ini tidak berubah, yaitu sebagai *single seller* penjual LNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian Negara yang berhak mengkreditkan PPN masukan jasa pengolahan LNG sesuai surat penegasan tersebut.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan telah mengabaikan fakta operasi kegiatan bisnis LNG yang telah berjalan sejak tahun 1974 yang menguntungkan Negara dengan tatanan hukum yang berjalan lebih dari 36 tahun. Pengkreditan PPN bersifat khas dan merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945 pengelolaan LNG bagi kepentingan Negara dan penegasan fiskal. Bentuk pelaksanaan penugasan pemerintah yang telah dijalankan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari awal proyek berdiri hingga saat ini telah berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan terhadap kas Negara dengan semata-mata untuk menjamin keuntungan Negara sesuai amanat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa berdasarkan uraian memori Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan tidak setuju dan mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menolak Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi pengkreditan Pajak Masukan atas PPN jasa pengolahan LNG;

Dengan demikian berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63410/PP/M.IIA/16/2015 tanggal 08 September 2015 yang memutuskan menolak permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum, kami mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali ini dan memutuskan bahwa Pertamina berhak mengkreditkan PPN Jasa Pengolahan LNG sebesar Rp18.607.407.223,00;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1533/WPJ.19/2013, tanggal 30 Oktober 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010, Nomor 00476/207/10/051/12, tanggal 10 Desember 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.001.664.0-051.000, adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Agustus 2010 sebesar Rp18.607.407.223,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terikat dengan Kontrak Berjalan (*Existing Contracts*) dan dipertegas dengan Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 1869 K/10/MEM/2007, tanggal 19 Juni 2007, di mana Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) bertindak sebagai pihak dalam perjanjian dan/atau kesepakatan sebagai Penjual Gas Bumi bagian negara dan bukan sebagai pemilik LNG, serta bukan sebagai penerima jasa pengolahan LNG yang mendapatkan *marketing fee*, sehingga tidak memenuhi persyaratan formal pengkreditan Pajak Masukan, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) *juncto* ayat (8) huruf b *juncto* Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Pertamina (Persero) tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Halaman 51 dari 52 halaman. Putusan Nomor 811/B/PK/PJK/2016

Nomor 811/B/PK/PJK/2016 – Rumpun Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Perinta Naikah Putusan – Taula Fikri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. Pertamina (Persero)** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 September 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | | |
|-----------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002